



## **PEMBANGUNAN TERPADU DAERAH PENYANGGA DEPAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN - MALAYSIA GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL**

**Joseph Robert Giri, Sri Sundari, Haetami**

Strategi Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Laut Natuna Utara terutama pada masa damai, Indonesia melaksanakan upaya pengendalian laut. Namun demikian, pengendalian laut yang dilaksanakan saat ini masih belum optimal karena masih adanya ancaman/kerawanan, belum terbangun *unity of effort* guna mendukung pengendalian laut secara kolaboratif antara TNI AL dan Bakamla RI serta belum efektifnya strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna Utara. Penelitian ini mengkaji kondisi existing ancaman/kerawanan di Laut Natuna Utara dan kolaborasi TNI AL - Bakamla RI serta merumuskan strategi operasi kolaborasi TNI AL - Bakamla RI dalam mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan teori ancaman, teori kolaborasi dan teori strategi serta pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara terhadap 5 Narasumber yang berasal dari TNI AL dan Bakamla RI. Hasil penelitian ini menyatakan ancaman/kerawanan yang ada di Laut Natuna saat ini antara lain kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera Vietnam dan China, penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing berbendera Vietnam dan anomali pergerakan kapal niaga di Laut Natuna serta potensi ancaman/kerawanan dari kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera negara NATO dan sekutunya. Selain itu saat ini belum ada operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna sehingga perlu adanya rumusan strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di wilayah tersebut dalam rangka menghadapi ancaman/kerawanan yang ada.

**Kata Kunci:** Pembangunan Terpadu, Daerah Penyangga Depan, Ketahanan Nasional.

## PENDAHULUAN

Perbatasan negara dimanapun di dunia ini, tentu memiliki berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal dan permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya garis batas pemisah antara negara atau Border. Demikian pula dengan batas negara di Indonesia, yang memiliki 10 batas dengan negara lain dan 3 perbatasan darat. Salah satu perbatasan negara yang paling banyak permasalahannya dan tergolong unik adalah perbatasan negara RI dan Malaysia yang terletak di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dikatakan unik karena Kabupaten Nunukan tidak saja memiliki perbatasan darat atau laut saja dengan negara tetangga Malaysia, namun juga memiliki perbatasan pulau yaitu pulau Sebatik Indonesia dan pulau Sebatik Malaysia, juga memiliki perbatasan sungai yang dibagi dua, yaitu sungai Sei Sekaca Indonesia dan Sei Sekaca Malaysia. Keunikan lainnya adalah Kabupaten Nunukan terdiri dari Kabupaten Nunukan kepulauan dan juga Kabupaten Nunukan yang berada di pulau Kalimantan.

Kabupaten Nunukan yang terletak di utara Indonesia termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (daerah 3T) yang langsung berbatasan bukan saja dengan Malaysia namun juga dengan Filipina dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dengan memiliki berbagai permasalahan dan potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Nunukan terdiri dari beberapa pulau sehingga memberikan kesan bahwa daerah perbatasan Indonesia memiliki begitu banyak "pintu masuk" dan "bersifat terbuka", kesan inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan dan potensi ancaman di daerah perbatasan negara yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Beberapa permasalahan di kawasan perbatasan meliputi: (1) kondisi geografis kawasan perbatasan yang relatif terisolasi sehingga sulit dijangkau; (2) keterbatasan prasarana/sarana transportasi sehingga sulit untuk melakukan mobilisasi dan membutuhkan biaya mahal menjadi penghambat utama dalam melakukan percepatan pembangunan; (3) langka dan mahalnya bahan-bahan pokok untuk kebutuhan hidup sehari-hari; (4) infrastruktur yang sangat terbatas dan tidak memadai; (5) minimnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah; (6) fasilitas kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat yang rendah; serta (7) tingkat kerawanan yang cukup tinggi dengan berbagai kegiatan ilegal, human trafficking, tindak kriminal antar negara dan jalur lintas teroris serta penjualan senjata, munisi dan bahan peledak di kawasan perbatasan yang juga merupakan potensi ancaman bagi kedaulatan negara.

Kabupaten Nunukan yang memiliki geografi yang bervariasi baik darat, laut, sungai, hutan tropis, rawa dan perbukitan serta gunung-gunung yang cukup tinggi dengan luas wilayah 14.247,50 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 199.090 jiwa (2020). Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 6,83% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 4,58 % penyebaran penduduk yang tidak merata dan masih terpusat pada kecamatan Nunukan dan kecamatan Sebatik sedangkan mata pencarian penduduk sebagian besar adalah sebagai petani, nelayan, pedagang juga pegawai negeri sipil. Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi minus 1,57% (Y-on-Y) dari data Badan Statistik Kabupaten Nunukan (BPS:2022). Minimnya sarana pendidikan dan juga tenaga pendidik serta sarana kesehatan yang kurang memadai dengan kurangnya tenaga medis di 4 (empat) rumah sakit maupun 16 (enam belas)

Puskesmas sehingga masyarakat lebih cenderung berobat ke Tawau-Malaysia atau ke kabupaten lain di sekitarnya.

Mengacu pada kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Kabupaten Nunukan serta berbagai permasalahan yang ada dan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara di wilayah perbatasan lainnya, pemerintah Indonesia memiliki visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara yang juga menjadi alternatif dari solusi yang ditawarkan adalah: "Menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia," (M.Tarno Seman dan Sumanto, 2014:14).

Visi pengembangan kawasan perbatasan tersebut sangat sesuai dengan Paradigma Nasional tentang perbatasan negara sebagai pintu gerbang atau halaman depan negara. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres No 12 Tahun 2010 tentang BNPP sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama mengelola perbatasan dengan sektor terdepan (leading sector) dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka membangun perbatasan negara.

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang dari beranda negara seyogyanya mempertimbangkan dua hal yaitu keamanan (security approach) dan kesejahteraan (prosperity approach). Pendekatan keamanan (security approach) pada umumnya mengedepankan kekuatan pertahanan dan penguatan ideologi pada warga negara Indonesia. Sedangkan, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) pada hakikatnya adalah

percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan secara khusus dan memberi dampak positif terhadap masyarakat pada umumnya.

Berbagai permasalahan kompleks di perbatasan wilayah Kalimantan Utara perlu penanganan, koordinasi dan kerjasama secara komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai lembaga terkait baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Nasional di daerah tersebut guna kepentingan pembangunan wilayah perbatasan. Pengembangan kawasan daerah perbatasan yang dilaksanakan dapat sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai Daerah Penyangga Depan (Buffer Zone) yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat Ketahanan Nasional.

Pembangunan terpadu yang dilandasi dengan semangat paradigma nasional yaitu membangun mulai dari wilayah pinggiran dengan menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang atau halaman depan dan serambi depan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan konsep Daerah Penyangga Depan (Buffer Zone) untuk Ketahanan Nasional. Pembangunan terpadu tersebut tentunya juga mempertimbangkan dan memperhatikan tentang perkembangan lingkungan strategi yang sedang berlangsung baik lingkungan global, lingkungan regional maupun lingkungan nasional dan khususnya lingkungan kawasan perbatasan antar negara itu sendiri.

Untuk membangun kota secara terpadu, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dan perlu dioptimalisasikan sehingga terwujud Kota Terpadu Mandiri, antara lain; 1) Pembangunan yang belum merata dan terintegrasi dengan baik, 2) Belum adanya daerah sebagai titik kuat untuk

pembangunan kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan, 3) Mekanisme hubungan kerja antara instansi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam menangani berbagai masalah di perbatasan, 4) Regulasi yang harus diperbaiki baik sistem maupun pelaksanaan dalam penanganan berbagai masalah di perbatasan dan yang terakhir adalah 5) Meningkatkan dan memaksimalkan sistem keamanan secara terpadu sebagai bagian dari sistem keamanan nasional guna meningkatkan dan mendukung aspek-aspek Ketahanan Nasional di wilayah perbatasan negara.

Harapan yang ingin diwujudkan dari pembangunan terpadu tersebut adalah terbentuknya beberapa titik-titik kuat sebagai embrio dari Kota Terpadu Mandiri di sepanjang perbatasan negara yang dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, sekaligus meningkatkan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan sehingga mampu dan menjamin keamanan nasional dalam rangka mendukung ketahanan nasional di wilayah perbatasan negara khususnya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dirancang untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan dalam membangun daerah penyangga depan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan khususnya di tiga kecamatan yang berpotensi sebagai titik kuat pembangunan terpadu yang merupakan daerah penyangga depan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep antara lain; 1) Pertahanan Negara, 2) Strategi Militer, 3) Kampanye

Militer, 4) Pembangunan Terpadu, yang terdiri dari; Teori Daerah/Wilayah Inti oleh Jhon Friedmann, 1972; Teori Polarization Effect dan Tricle Down Effect oleh Hirschmant, 1950; Teori Kutub Pertumbuhan oleh Perroux, 1955, Teori Tata Kelola, Teori Regulasi (Public Interest Theory), dan Teori Keamanan Nasional, 5) Daerah Penyangga Depan (Buffer Zone), 6) Ketahanan Nasional. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber yang terlibat dalam perkembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan melakukan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai kajian literatur, dokumen dan arsip yang relevan yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Selanjutnya, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan triangulasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode penelitian yang dirancang untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan dalam membangun daerah penyangga depan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan khususnya di tiga kecamatan yang berpotensi sebagai titik kuat pembangunan terpadu yang merupakan daerah penyangga depan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep antara lain; 1) Pertahanan Negara, 2) Strategi Militer, 3) Kampanye Militer, 4) Pembangunan Terpadu, yang terdiri dari; Teori Daerah/Wilayah Inti oleh Jhon Friedmann, 1972; Teori Polarization Effect dan Tricle Down Effect oleh Hirschmant, 1950; Teori Kutub Pertumbuhan oleh Perroux, 1955, Teori Tata Kelola, Teori Regulasi (Public

Interest Theory), dan Teori Keamanan Nasional, 5) Daerah Penyangga Depan (Buffer Zone), 6) Ketahanan Nasional. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber yang terlibat dalam perkembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan melakukan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai kajian literatur, dokumen dan arsip yang relevan yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Selanjutnya, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan triangulasi data.

## **SIMPULAN**

Pembangunan yang merata dan terintegrasi dengan baik di perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dapat terlaksana dengan baik secara terencana dan berkelanjutan bila ada kebijakan khusus untuk membangun Kota Terpadu Mandiri sebagai daerah penyangga depan dengan memanfaatkan Sumber Daya Nasional dengan melakukan penataan dan pengelolaan pembangunan dibidang Sarana dan Prasarana, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya dengan membangun kesadaran belanegara dan cinta tanah air di wilayah perbatasan negara. Pembangunan tersebut dilakukan dengan metode pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional yang berada di pusat maupun di daerah, wilayah perbatasan negara yang difasilitasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) termasuk Lembaga dan Kementerian yang terkait dengan pengelolaan perbatasan, Kemhan dan Mabes TNI.

Pembangunan Kota Terpadu Mandiri yang merupakan titik kuat pembangunan kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan tidak

hanya berorientasi pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan semata namun penempatan titik kuat juga harus dipertimbangkan dari aspek tinjauan strategi di wilayah perbatasan dan berfungsi sebagai daerah penyangga depan (Buffer Zone) yang juga merupakan titik-titik kuat daerah penyangga depan yang akan dijadikan sebagai daerah pangkal perlawanan apabila negara dalam kondisi tertentu dan berkonflik dengan negara tetangga sehingga titik kuat tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari strategi militer dalam rangka kampanye militer yang digelar di wilayah perbatasan negara. Oleh karena itu, daerah penyangga depan juga harus dibangun dengan memperhatikan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dapat menunjang dan mengakomodir gelar kekuatan militer dalam rangka kampanye militer di wilayah perbatasan negara. Dengan demikian maka metode pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan Kota Terpadu Mandiri harus dilakukan melalui sarana pemerintah pusat/daerah, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kemhan serta Mabes TNI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bahan ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, tahun 2021.

Bahan Ajaran Sesko TNI. 27 Maret 2013. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Bujuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (Binter). 2007. Penerbit Mabesad Jakarta.

Depdagri. Dirjen Pemerintahan Umum Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. 2004. Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Negara.

Dephan. 2005. Menata Sistem Pertahanan. (Kaji Ulang Pertahanan/ Strategic Defence Review).

Dephan. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Penerbit Dephan RI.

Disjarahad. 2012. Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Disjarahad.

DR. Marnixon.R.C. 2006. Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara. Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Herman. Hidayat. 2005. Dari Entikong sampai Nunukan. (Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur). Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

J. Suryo. Prabowo. 2009. Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta. Penerbit Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

J. Suryo. Prabowo. 2012. Desain Pertahanan Negrara Aspek Militer. Penerbit Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

Juklak tentang Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat. 2005. Penerbit Mabasad Jakarta.

Mustafa. Abubakar. 2006. Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. (Belajar dari kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik). Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan.

Pokja Tim Orasi Ilmiah Seskoad 2004. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Menghadapi Perang Modern.

Suryo. Sakti. H. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia. (Dimensi, Permasalahan dan

Strategi Penanganan). Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Tono. Suratman. 2008. Patriotisme Semangat Bela Negara. Penerbit Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Bogor.

Tono. Suratman. 2010. Pramuka Pilar Tangguh Generasi Muda Bangsa. Penerbit Buana Printing, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penerbit Penerbit Fermanana, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penerbit Fermanana, Bandung.

UU RI no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.